



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HASIAMAH DISTIYAWATI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **110643**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	567.096.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 85.080.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/46 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 57.600.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/36 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000		
4. Tanah Seluas 347 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 16.656.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 85.080.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 85.080.000		
7. Tanah Seluas 240 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 96.000.000		
8. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/46 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 57.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.655.337
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----



Sub Total	Rp.	583.751.337
III. HUTANG	Rp.	500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	83.751.337

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.